



Systematic Literature Review: Integrasi Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik dalam Perencanaan Pendidikan

Devindra Herva Dwi Putra^{*1}, Hafidhoh Nuron Ahfatunnida², Shafira Annissa Az-Cahra³, Rani Cahyaning Tiyas⁴, Aizzahra Heri Putri Permata⁵

^{1*,2,3,4,5} Departemen Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: devindrahervadp@gmail.com

Article History:

Received: Nov 17, 2024

Revised: Dec 20, 2024

Accepted: Jan 18, 2025

Keywords:

Education planning; multidisciplinary approach; economic perspective; social perspective; cultural perspective; political perspective.

Abstract: Education planning is a process shaped by economic, social, cultural, and political conditions. However, existing studies often examine these dimensions separately, limiting understanding of their interaction within integrated education planning. This study aims to identify the contributions of economic, social, cultural, and political perspectives to education planning, analyze their relationships, and formulate a multidisciplinary conceptual framework. A qualitative approach using Systematic Literature Review was employed. Literature was searched through Google Scholar, Directory of Open Access Journals, and Garuda using the keywords "education planning" AND ("economic" OR "social" OR "cultural" OR "political"), limited to publications from 2019 to 2025. Of 43 documents initially identified, 25 sources were selected based on criteria and analyzed using thematic synthesis. Findings show that the economic perspective supports financing efficiency, resource management, capital investment, and program sustainability; the social perspective emphasizes participation, collaboration, equity, and inclusion; the cultural perspective strengthens contextual relevance, values, identity, and diversity; while the political perspective shapes policy direction, regulation, resource distribution, authority, and legitimacy. These dimensions are interdependent and should be considered simultaneously. Therefore, this study proposes the ESBP framework for adaptive, inclusive, contextual, and sustainable education planning.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Putra, D. H. D., Ahfatunnida, H. N., Az-Zahra, S. A., Tiyas, R. C., Permata, A. H. P., & Lahia, I. (2025). Systematic Literature Review: Integrasi Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik dalam Perencanaan Pendidikan . *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i1.7091>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis pembangunan manusia karena meningkatkan kapasitas individu, produktivitas masyarakat, dan kualitas pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan pendidikan membutuhkan perencanaan yang menghubungkan tujuan pendidikan dengan kebutuhan

masyarakat dan konteks lingkungan. Perencanaan pendidikan mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, bukan sekadar penyusunan program dan alokasi sumber daya (Cikka, 2019; Nardawati, 2022). Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan memahami berbagai konteks yang membentuk sistem pendidikan.

Sistem pendidikan berada dalam lingkungan sosial yang kompleks, di mana kondisi ekonomi menentukan sumber daya dan pembiayaan, kondisi sosial memengaruhi kebutuhan serta partisipasi masyarakat, budaya menentukan relevansi nilai dan praktik pendidikan, sedangkan politik memengaruhi kebijakan, regulasi, dan distribusi sumber daya (Hanifah & Yulhendri, 2022; Rahman & Ma'ruf, 2023). Perspektif ekonomi memandang pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang membutuhkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat optimal (Hanifah & Yulhendri, 2022). Perspektif sosial menekankan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, dan institusi lain dalam mendukung pemerataan akses, partisipasi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan.

Dimensi budaya juga penting karena pendidikan berfungsi mewariskan nilai, norma, pengetahuan, dan identitas masyarakat. Perencanaan yang mengabaikan keragaman budaya berisiko menghasilkan program yang kurang relevan, sedangkan integrasi nilai budaya lokal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat serta memperkuat identitas dan karakter peserta didik (Widyastuti, 2021). Sementara itu, perspektif politik berkaitan dengan pengambilan keputusan, kewenangan, regulasi, dan distribusi sumber daya publik. Keputusan politik menentukan prioritas pembangunan, penganggaran, standar, dan kebijakan pendidikan, sehingga diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Suhada, 2020).

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan pendidikan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, tetapi umumnya masih dilakukan secara terpisah. Kajian human capital menekankan hubungan investasi pendidikan dengan pembangunan ekonomi, penelitian sosial menyoroti kemitraan sekolah dan masyarakat, kajian budaya membahas hubungan pendidikan dengan nilai dan identitas, sedangkan kajian politik menekankan pengaruh regulasi dan kebijakan terhadap arah pendidikan (Cikka, 2019; Suhada, 2020; Widyastuti, 2021). Fragmentasi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner yang mampu menjelaskan keterkaitan antardimensi karena persoalan pendidikan tidak dapat dipahami secara memadai melalui satu perspektif saja (Rahman & Ma'ruf, 2023).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kontribusi perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan politik, menganalisis keterkaitan antardimensi, serta merumuskan kerangka konseptual

multidisipliner bagi perencanaan pendidikan yang adaptif dan kontekstual. Secara khusus, penelitian menjawab tiga pertanyaan:

1. RQ1: Bagaimana kontribusi perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam perencanaan pendidikan?
2. RQ2: Bagaimana keterkaitan antardimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam perencanaan pendidikan?
3. RQ3: Bagaimana kerangka konseptual multidisipliner dapat dirumuskan berdasarkan hasil sintesis literatur?

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menentukan tujuan, prioritas, strategi, sumber daya, dan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program, tetapi juga mencakup analisis kebutuhan, penentuan prioritas, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan evaluasi. Cikka (2019) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan pendidikan karena berfungsi menghubungkan kebutuhan pendidikan dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, Nardawati (2022) menegaskan bahwa perencanaan pendidikan yang baik perlu mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi mutu pendidikan, termasuk perubahan lingkungan dan tuntutan perkembangan masyarakat.

Perencanaan pendidikan pada dasarnya memiliki karakter multidimensional karena pendidikan berada dalam lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kondisi ekonomi menentukan ketersediaan sumber daya, kondisi sosial menunjukkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, budaya memberikan konteks nilai dan identitas, sedangkan politik menentukan arah kebijakan dan distribusi kewenangan. Suhada (2020) menekankan bahwa perencanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya, dan pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner diperlukan agar perencanaan pendidikan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat (Rahman & Ma'ruf, 2023).

Perspektif Ekonomi dalam Perencanaan Pendidikan

Perspektif ekonomi dalam perencanaan pendidikan berangkat dari pandangan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia. Investasi pendidikan diharapkan menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Hanifah dan Yulhendri (2022) menjelaskan bahwa human capital memiliki hubungan dengan kebijakan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi karena

pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam konteks perencanaan, perspektif ekonomi tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pengelolaan sumber daya menjadi aspek penting karena keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Abrianti dan Suchaina (2022) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi human capital yang memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Sementara itu, Mahmudah (2016) menunjukkan pentingnya investasi human capital dalam meningkatkan efektivitas pengembangan tenaga kependidikan. Berdasarkan perspektif tersebut, perencanaan pendidikan perlu mempertimbangkan pembiayaan, efisiensi alokasi sumber daya, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan program sebagai bagian dari pengambilan keputusan pendidikan.

Perspektif Sosial dan Budaya dalam Perencanaan Pendidikan

Perspektif sosial memandang pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang melibatkan interaksi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi penting karena proses pendidikan tidak berlangsung secara terpisah dari kondisi sosial peserta didik. Bahari (2015) menjelaskan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan edukatif, kultural, dan institusional. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan perlu mempertimbangkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat sehingga program yang dirancang tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusi pendidikan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial. Dengan demikian, dimensi sosial dalam perencanaan pendidikan berkaitan dengan kolaborasi, partisipasi, pemerataan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Selain aspek sosial, pendidikan juga memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan. Pendidikan berfungsi sebagai proses pewarisan nilai, norma, pengetahuan, dan identitas masyarakat, sementara perubahan pendidikan juga dapat memengaruhi perkembangan kebudayaan. Widyastuti (2021a) menjelaskan bahwa hubungan pendidikan dan budaya tercermin dalam proses akulturasi nilai dalam sistem pendidikan, sedangkan Widyastuti (2021b) menempatkan kebudayaan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Dalam konteks perencanaan, kondisi budaya perlu diperhatikan agar kebijakan dan program pendidikan memiliki relevansi dengan karakteristik masyarakat setempat. Integrasi nilai lokal dan keragaman budaya juga dapat mendukung penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan serta memperkuat pembentukan karakter peserta didik (Ichsan & Hadiyanto, 2021).

Perspektif Politik dalam Perencanaan Pendidikan

Perspektif politik dalam perencanaan pendidikan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, kebijakan, regulasi, kewenangan, dan distribusi sumber daya. Pendidikan merupakan bagian dari sistem publik sehingga arah perkembangannya dipengaruhi oleh keputusan politik pada tingkat nasional maupun daerah. Suhada (2020) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan memiliki hubungan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menentukan arah penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks tersebut, politik memiliki peran dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan, alokasi anggaran, kebijakan kurikulum, standar pendidikan, serta pembagian kewenangan antaraktor pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak hanya merupakan proses teknis, tetapi juga proses kebijakan yang melibatkan kepentingan dan keputusan berbagai pemangku kepentingan.

Peran politik dalam pendidikan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dukungan politik dapat memperkuat legitimasi kebijakan, menyediakan sumber daya, dan menciptakan regulasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu dipengaruhi kepentingan jangka pendek dapat mengurangi konsistensi dan keberlanjutan perencanaan pendidikan. Yuliani dan Riyanto (2023) menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan pendidikan dasar bermutu, yang menunjukkan bahwa distribusi kewenangan dan kebijakan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, perspektif politik dalam perencanaan pendidikan perlu diarahkan pada kebijakan yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengorganisasi, dan mensintesis literatur mengenai peran ilmu ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam perencanaan pendidikan. SLR digunakan untuk memahami temuan penelitian terdahulu, mengidentifikasi pola, hubungan antardimensi, serta kesenjangan penelitian (Vanessa, 2020). Proses kajian meliputi empat tahap, yaitu *planning*, *data collection*, *analysis*, dan *synthesis*, yang mencakup perumusan masalah dan kriteria literatur, pengumpulan serta seleksi sumber, analisis temuan, dan integrasi hasil menjadi sintesis konseptual (Vanessa, 2020). Pendekatan ini sesuai untuk kajian multidisipliner karena memungkinkan integrasi berbagai perspektif dalam memahami perencanaan pendidikan secara komprehensif (Rahman & Ma'ruf, 2023). Penelitian diarahkan pada tiga pertanyaan, yaitu RQ1 bagaimana kontribusi dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik terhadap perencanaan pendidikan; RQ2 bagaimana keterkaitan antardimensi tersebut dalam mendukung perencanaan pendidikan; dan RQ3

bagaimana kerangka konseptual multidisipliner dapat dirumuskan berdasarkan sintesis literatur. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, DOAJ, dan Garuda menggunakan kata kunci “perencanaan pendidikan” AND (“ekonomi” OR “sosial” OR “budaya” OR “politik”), dengan batas publikasi 2019–2025 dan mempertimbangkan relevansi terhadap konteks Indonesia.

Kriteria inklusi mencakup literatur yang membahas perencanaan pendidikan atau aspek yang berhubungan substantif dengannya, membahas minimal satu dimensi ekonomi, sosial, budaya, atau politik, diterbitkan pada 2019–2025, tersedia dalam teks lengkap, dan memiliki informasi bibliografis yang dapat diidentifikasi. Literatur dikeluarkan apabila berupa opini atau tulisan populer, tidak relevan secara substantif, tidak tersedia dalam teks lengkap, merupakan duplikasi, atau berada di luar rentang tahun yang ditentukan. Penelusuran awal menghasilkan 43 dokumen, yang kemudian diseleksi melalui tahap identification, screening, eligibility, dan included berdasarkan judul, abstrak, tahun, relevansi, ketersediaan teks lengkap, dan duplikasi, sehingga diperoleh 25 literatur sebagai sumber utama. Data diekstraksi berdasarkan penulis, tahun publikasi, fokus penelitian, dimensi yang dibahas, kontribusi terhadap perencanaan pendidikan, dan temuan relevan, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan thematic synthesis melalui proses pengodean temuan, pengelompokan kode menjadi tema, serta perbandingan tema untuk mengidentifikasi hubungan antardimensi dan membangun sintesis konseptual. Tema ekonomi meliputi pembiayaan, efisiensi sumber daya, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan; sosial mencakup hubungan sekolah, keluarga, masyarakat, partisipasi, pemerataan, dan inklusi; budaya mencakup nilai lokal, identitas, norma, multikulturalisme, dan relevansi pendidikan; sedangkan politik mencakup kebijakan, regulasi, kewenangan, distribusi sumber daya, dan legitimasi. Hasil sintesis digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam perencanaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Literatur dan Temuan Utama

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan bidang kajian yang memiliki karakter multidisipliner karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi di luar aspek administratif pendidikan. Dari 43 dokumen yang teridentifikasi pada tahap awal, sebanyak 25 literatur memenuhi kriteria inklusi dan ditetapkan sebagai sumber utama analisis. Literatur tersebut mencakup kajian mengenai *human capital*, hubungan sekolah dengan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, kebijakan pendidikan, perencanaan pendidikan, serta pendekatan multidisipliner. Keragaman fokus tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan tidak dapat dijelaskan secara

memadai melalui satu perspektif keilmuan saja. Temuan ini sejalan dengan Rahman dan Ma'ruf (2023) yang menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami persoalan pendidikan yang kompleks. Selain itu, Cikka (2019) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan merupakan bagian dari proses pembangunan yang membutuhkan pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi arah dan pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil kajian memperlihatkan bahwa dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik memiliki posisi yang saling melengkapi dalam membentuk perencanaan pendidikan yang komprehensif.

Berdasarkan sintesis literatur, perspektif ekonomi terutama menjelaskan bagaimana sumber daya pendidikan dikelola agar menghasilkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Pendidikan dipandang sebagai investasi *human capital* yang dapat meningkatkan kapasitas individu, produktivitas tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Hanifah & Yulhendri, 2022). Dalam perencanaan pendidikan, perspektif ini memberikan dasar untuk mempertimbangkan pembiayaan, efisiensi penggunaan sumber daya, kebutuhan infrastruktur, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan program. Abrianti dan Suchaina (2022) menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan sebagai investasi *human capital* memiliki keterkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, sehingga investasi pendidikan perlu dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan biaya tetapi juga manfaat sosial-ekonominya. Mahmudah (2016) juga menunjukkan pentingnya investasi *human capital* dalam mendukung efektivitas pengembangan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kontribusi perspektif ekonomi dalam perencanaan pendidikan dapat dirangkum dalam aspek pembiayaan, efisiensi, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan program.

Perspektif sosial menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari sistem masyarakat yang melibatkan interaksi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Hubungan tersebut penting karena kebutuhan pendidikan peserta didik tidak terbentuk secara terpisah dari kondisi sosial dan lingkungan tempat mereka hidup. Bahari (2015) menjelaskan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan edukatif, kultural, dan institusional yang memungkinkan sekolah membangun kerja sama dengan keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait. Dalam perencanaan pendidikan, hubungan tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan, pemerataan akses, kolaborasi, dan perhatian terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. Ramdhani et al. (2022) juga menegaskan bahwa perencanaan pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan pendidikan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lingkungan pendidikan. Dengan demikian, perspektif sosial berkontribusi dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya layak secara administratif, tetapi juga

responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pendidikan.

Perspektif budaya menunjukkan bahwa pendidikan selalu berhubungan dengan nilai, norma, identitas, pengetahuan, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai dan karakter, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan kebudayaan (Widyastuti, 2021a). Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik budaya lokal agar kebijakan dan program yang dikembangkan memiliki relevansi dengan konteks masyarakat. Widyastuti (2021b) menegaskan bahwa hubungan antara pendidikan dan kebudayaan bersifat timbal balik sehingga perubahan dalam satu bidang dapat memengaruhi bidang lainnya. Ichsan dan Hadiyanto (2021) juga menunjukkan pentingnya penguatan pelaksanaan kurikulum dalam membentuk karakter bangsa melalui pendidikan yang sesuai dengan konteks masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perspektif budaya memberikan kontribusi berupa relevansi kontekstual, pelestarian nilai, penguatan identitas, pembentukan karakter, dan penghargaan terhadap keragaman budaya.

Perspektif politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, kebijakan, regulasi, kewenangan, dan distribusi sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari sistem publik tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik yang menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, arah kebijakan, serta mekanisme implementasi. Suhada (2020) menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan memiliki hubungan erat dengan kebijakan dan keputusan mengenai arah penyelenggaraan pendidikan serta penggunaan sumber daya. Peran politik dapat memberikan dampak positif apabila menghasilkan dukungan kebijakan, anggaran, dan regulasi yang memperkuat pendidikan, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila pendidikan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek. Yuliani dan Riyanto (2023) menunjukkan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan pendidikan dasar bermutu, yang menunjukkan bahwa koordinasi kewenangan dan kebijakan memiliki konsekuensi terhadap keberhasilan perencanaan pendidikan. Oleh karena itu, perspektif politik memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan, regulasi, distribusi sumber daya, kewenangan, dan legitimasi pendidikan.

Sintesis Kontribusi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keempat perspektif memiliki fokus dan kontribusi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan pendidikan. Perspektif ekonomi berfungsi memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Perspektif sosial memastikan bahwa sumber daya dan manfaat pendidikan didistribusikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prinsip inklusi. Perspektif budaya

memastikan bahwa program pendidikan memiliki kesesuaian dengan nilai, identitas, dan karakteristik masyarakat setempat. Sementara itu, perspektif politik memberikan arah kebijakan, regulasi, kewenangan, dan legitimasi yang diperlukan agar perencanaan dapat diimplementasikan. Hubungan keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan membutuhkan keseimbangan antara efisiensi, keadilan, relevansi, dan legitimasi.

Tabel 1. Sintesis Kontribusi Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik

Perspektif	Fokus Utama	Kontribusi terhadap Perencanaan Pendidikan	Implikasi
Ekonomi	Pembiayaan, efisiensi, investasi SDM	Menentukan kelayakan, efisiensi, dan keberlanjutan program	Penggunaan sumber daya yang optimal
Sosial	Partisipasi, hubungan sekolah-masyarakat, pemerataan	Memastikan perencanaan responsif dan inklusif	Pemerataan dan partisipasi masyarakat
Budaya	Nilai, identitas, norma, keragaman	Menjamin relevansi program dengan konteks lokal	Penerimaan dan relevansi budaya
Politik	Kebijakan, regulasi, kewenangan, sumber daya	Menentukan arah, legitimasi, dan kesinambungan kebijakan	Stabilitas dan legitimasi kebijakan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu perspektif yang secara mandiri mampu menjelaskan seluruh kebutuhan perencanaan pendidikan. Efisiensi ekonomi, misalnya, dapat meningkatkan keberlanjutan program tetapi tidak secara otomatis menjamin pemerataan apabila distribusi sumber daya tidak mempertimbangkan ketimpangan sosial (Abrianti & Suchaina, 2022). Demikian pula, perencanaan yang telah mempertimbangkan kebutuhan sosial masih dapat menghadapi hambatan apabila tidak sesuai dengan nilai dan karakteristik budaya masyarakat (Widyastuti, 2021a). Di sisi lain, kebijakan yang telah memperoleh legitimasi politik belum tentu efektif apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan bahwa perencanaan pendidikan perlu dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner agar setiap keputusan dapat dianalisis berdasarkan konsekuensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara simultan (Rahman & Ma'ruf, 2023).

Keterkaitan Antardimensi dalam Perencanaan Pendidikan

Sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antardimensi tidak bersifat linear, tetapi membentuk hubungan timbal balik dalam suatu sistem perencanaan pendidikan. Hubungan ekonomi dan sosial terlihat ketika investasi pendidikan harus mempertimbangkan ketimpangan agar manfaat pembangunan sumber daya manusia dapat dirasakan secara lebih merata (Susanto, 2024). Hubungan ekonomi dan politik terlihat dalam proses penentuan anggaran, prioritas pembangunan, serta distribusi sumber daya yang pada dasarnya

merupakan bagian dari keputusan kebijakan publik (Yuliani & Riyanto, 2023). Hubungan sosial dan budaya terlihat melalui kebutuhan untuk mengintegrasikan karakteristik dan nilai masyarakat dalam pendidikan agar kebijakan dapat diterima serta mendukung inklusi sosial (Tadrisuna, 2023). Sementara itu, hubungan politik dan budaya terlihat melalui kebijakan dan regulasi yang dapat memberikan ruang bagi pelestarian nilai lokal dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, setiap dimensi tidak hanya memberikan pengaruh terhadap perencanaan pendidikan secara individual, tetapi juga memengaruhi cara dimensi lainnya diterapkan.

Tabel 2. Keterkaitan Antardimensi dalam Perencanaan Pendidikan

Keterkaitan	Mekanisme	Implikasi bagi Perencanaan
Ekonomi → Sosial	Distribusi sumber daya mempertimbangkan ketimpangan	Pemerataan akses pendidikan
Ekonomi → Politik	Anggaran dan prioritas pendidikan ditentukan melalui kebijakan	Kesinambungan program
Sosial → Budaya	Kebutuhan masyarakat berhubungan dengan nilai dan karakter lokal	Penerimaan dan inklusi
Budaya → Politik	Nilai lokal menjadi pertimbangan dalam pembentukan regulasi	Perlindungan identitas budaya
Politik → Ekonomi	Kebijakan menentukan alokasi sumber daya	Efektivitas pembiayaan
Politik → Sosial	Kebijakan menentukan akses dan perlindungan kelompok	Keadilan pendidikan
ESBP	Keempat dimensi dianalisis secara simultan	Perencanaan adaptif dan komprehensif

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan lebih tepat dipahami sebagai sebuah ekosistem daripada kumpulan keputusan yang berdiri sendiri. Kondisi ekonomi menentukan kapasitas sumber daya yang tersedia, sedangkan kondisi sosial menentukan bagaimana sumber daya tersebut dibutuhkan dan didistribusikan. Pada saat yang sama, kondisi budaya menentukan tingkat relevansi dan penerimaan masyarakat terhadap program pendidikan, sementara politik menentukan kerangka regulasi dan kewenangan yang memungkinkan program tersebut dilaksanakan. Suhada (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan memiliki hubungan erat dengan kebijakan dan pengambilan keputusan, sedangkan Cikka (2019) menempatkan perencanaan pendidikan sebagai bagian dari proses pembangunan yang dipengaruhi berbagai kondisi. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa ketidakseimbangan pada satu dimensi dapat memengaruhi capaian dimensi lainnya. Oleh sebab itu, analisis multidimensi diperlukan sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan agar perencanaan pendidikan tidak menghasilkan solusi yang bersifat parsial.

Kerangka Konseptual ESBP dan Implikasi Perencanaan Pendidikan

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual ESBP (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik) sebagai pendekatan integratif dalam perencanaan pendidikan. Kerangka ini menempatkan keempat dimensi bukan sebagai faktor yang berdiri sendiri, tetapi sebagai komponen yang dianalisis secara simultan dalam seluruh siklus perencanaan. Tahap pertama berupa input multidimensi, yaitu identifikasi kondisi ekonomi berupa anggaran dan infrastruktur, kondisi sosial berupa demografi dan kesenjangan akses, kondisi budaya berupa nilai lokal dan identitas, serta kondisi politik berupa regulasi dan kewenangan. Tahap kedua berupa perencanaan terintegrasi, yaitu proses menentukan prioritas, melibatkan pemangku kepentingan, menyusun alternatif kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan hasil analisis multidimensi. Tahap ketiga berupa implementasi adaptif, yaitu pelaksanaan program dengan mempertimbangkan keragaman daerah dan kebutuhan kelompok sasaran, sedangkan tahap keempat berupa evaluasi multidimensi yang mencakup efisiensi sumber daya, pemerataan, penerimaan sosial, relevansi budaya, dan keberlanjutan kebijakan.



Gambar 1. Kerangka ESBP

Kerangka ESBP memperluas pemahaman mengenai perencanaan pendidikan yang sebelumnya cenderung menempatkan pembiayaan, kebutuhan masyarakat, budaya, atau kebijakan sebagai aspek yang dianalisis secara terpisah. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa perencanaan pendidikan membutuhkan integrasi berbagai perspektif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual (Rahman & Ma'ruf, 2023). Secara praktis, kerangka

tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menganalisis kondisi daerah sebelum menetapkan program pendidikan, sedangkan pengelola pendidikan dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang mendukung maupun menghambat implementasi program. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, pendekatan ini memberikan ruang bagi partisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan sosial dan konteks budaya yang relevan dengan pendidikan. Secara teoretis, kerangka ESBP memperkuat pandangan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses multidisipliner yang membutuhkan integrasi perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi kerangka konseptual yang menggeser perencanaan pendidikan dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif, adaptif, dan kontekstual.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Temuan penelitian memiliki implikasi bagi pengembangan teori maupun praktik perencanaan pendidikan. Secara teoretis, hasil kajian memperkuat posisi perencanaan pendidikan sebagai bidang multidisipliner yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara praktis, pemerintah dan pengelola pendidikan perlu melakukan analisis konteks multidimensi sebelum menentukan prioritas, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat berjalan bersama dengan pemerataan, relevansi budaya, dan legitimasi kebijakan. Pendekatan tersebut juga memberikan dasar bagi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan agar kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, penelusuran hanya dilakukan melalui Google Scholar, DOAJ, dan Garuda sehingga kemungkinan terdapat literatur relevan yang tersedia pada basis data lain tetapi tidak teridentifikasi. Kedua, rentang publikasi 2019–2025 membatasi cakupan literatur sehingga sejumlah sumber teoritis yang lebih lama tidak menjadi bagian utama sintesis, meskipun beberapa sumber terdahulu tetap digunakan sebagai landasan konseptual. Ketiga, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif sehingga penelitian ini belum dapat menentukan besaran hubungan atau pengaruh empiris antara keempat dimensi terhadap kualitas perencanaan pendidikan. Keempat, heterogenitas jenis, fokus, dan karakteristik 25 literatur menyebabkan kedalaman pembahasan pada setiap dimensi tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas basis data, menerapkan *critical appraisal* yang lebih ketat, dan menguji kerangka ESBP secara empiris pada konteks pendidikan yang berbeda untuk mengetahui validitas dan aplikabilitasnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi perspektif ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana perspektif ekonomi menekankan efisiensi pembiayaan, pengelolaan sumber daya, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan program, perspektif sosial menekankan partisipasi, hubungan sekolah dengan masyarakat, pemerataan, dan inklusi, perspektif budaya memastikan relevansi pendidikan dengan nilai, identitas, norma, dan keragaman masyarakat, sedangkan perspektif politik menentukan arah kebijakan, regulasi, distribusi sumber daya, kewenangan, dan legitimasi perencanaan pendidikan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena efisiensi ekonomi perlu diimbangi dengan keadilan sosial, perencanaan sosial perlu mempertimbangkan konteks budaya, dan implementasi keduanya membutuhkan dukungan kebijakan serta legitimasi politik, sehingga pendekatan parsial berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kompleksitas permasalahan pendidikan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengusulkan kerangka ESBP (Ekonomi–Sosial–Budaya–Politik) yang menempatkan analisis multidimensi sebagai dasar perencanaan pendidikan melalui tahapan analisis kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, perencanaan terintegrasi, implementasi adaptif, serta evaluasi multidimensi. Kerangka tersebut diharapkan dapat mendukung perencanaan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antardimensi secara simultan. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka ESBP melalui penelitian empiris pada tingkat nasional maupun daerah untuk mengetahui pola interaksi setiap dimensi dalam konteks pendidikan yang berbeda serta sejauh mana integrasi keempat perspektif tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan hasil pembangunan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

1. Abrianti, S., & Suchaina, S. (2022). Peran pendidikan dan kesehatan dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia: Pendekatan human capital. *Jurnal Ekonomi-Qu*.
2. Agustini, A., & Fauzani, A. K. (2021). Pengembangan human capital di dunia pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2). <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.209>
3. Bahari, Y. (2015). Hubungan sekolah dengan masyarakat pada MA Al-Aziz. *Jurnal Pendidik dan Pemberdayaan Masyarakat*.
4. Cikka, H. (2019). Konsep-konsep esensial dari teori dan model perencanaan dalam pembangunan pendidikan. *Scolae: Journal of Ped-agogy*, 3(2). <https://doi.org/10.56488/scolae.v3i2.81>
5. Deprizon, D., Fithri, R., Wismanto, B., Baidarus, B., & Refika, R. (2024). Sistem perencanaan manajemen pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN

- 2) Pekanbaru. Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI, 9(1). <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v9i1.800>
6. Fitri Nur Mahmudah, L. D. P. (2016). Keefektifan human capital investment pendidikan tenaga kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 77–86.
7. Fuadiyah, F. Q., Al Ainiyah, N., & Masud, A. (2025). Konsep pendidikan multidisipliner berbasis paradigma Twin-tower di lingkungan pesantren. *TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 187–196. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v8i2.3417>
8. Handayani, A. (2014). Posisi strategis pendidikan tinggi dalam pembangunan ekonomi. *PUBLICA*.
9. Hanifah, H., & Yulhendri, Y. (2022). Human capital, kebijakan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi: Analisis evidence di Indone-sia. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 78–92. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.11>
10. Ichsan, F. N., & Hadiyanto. (2021). Implementasi perencanaan pendidikan dalam meningkatkan karakter bangsa melalui penguatan pelaksanaan kurikulum. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 225–412.
11. Kurniatun, T. C. (2025). Dasar-dasar perencanaan pendidikan (ed. 1, Diajeng Ragil Pangestuti & Tarmizi, Eds.). Bumi Aksara. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat di SMAN 7 Kota Banjarmasin. (2014). *Tashwir*, 2(4), 153–164.
12. Nardawati. (2022). Perencanaan pendidikan yang baik sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di era digital. *Jurnal Literasiologi*, 6(2).
13. Pinem, M. (2016). Pengaruh pendidikan dan status sosial ekonomi kepala keluarga bagi kesehatan lingkungan masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 97–106. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.896>
14. Purwanto. (2012). Hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam T. C. Kurniatun (Ed.), *Dasar-dasar perencanaan pendidikan*. Bumi Aksara.
15. Purwanto, N. (2012). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
16. Rahman, F., & Ma'ruf, H. (2023). Penguatan dan pengembangan pendidikan Islam melalui pendekatan multidisipliner, in-terdisipliner, dan transdisipliner. *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(2). <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i2.2511>
17. Ramdhani, I., Rismasita, E., Ulfa, S., Harto, K., & Oviyanti, F. (2022). Perencanaan tahunan lembaga pendidikan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24062>
18. Septiana, Y., & Salahudin, S. (2023). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (sys-tematic

- literature review). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v9i1.42222>
19. Suhada. (2020). Problematika, peranan dan fungsi perencanaan pendidikan di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam & Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 147–162.
20. Susanto. (2024). Bunga rampai pendidikan pembangunan dan teknologi. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/617908-bunga-rampai-pendidikan-pembangunan-dan-0725f2a5.pdf>
21. Suryadi, A. (2022). Kependudukan dan pembangunan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(70), 1–17. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i70.3218>
22. Tadrisuna. (2023). Pendidikan multikultural dalam konteks kurikulum dan ekstrakurikuler. *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan, STIT Raden Santri*. <https://ejournal.stitradensantri.ac.id/index.php/tadrisuna/article/download/140/54/284>
23. Vanessa, G. (2020). *Systematic literature review methodology*. Universitas Pendidikan Indonesia.
24. Widyastuti. (2021a). Pendidikan dan budaya: Akulturasi nilai dalam sistem pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia*.
25. Widyastuti. (2021b). Pendidikan dan budaya: Analisis hubungan kebudayaan dengan sistem pendidikan. Dalam T. C. Kurniatun (Ed.), *Dasar-dasar perencanaan pendidikan*. Bumi Aksara.
26. Yuliani, N., & Riyanto, A. (2023). Peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan pendidikan dasar bermutu. *arXiv Preprint*. <https://arxiv.org/abs/2302.12837>